

Politik Anggaran dan Masa Depan Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. GAGASAN UTAMA

- APBN bukan sekadar angka, tetapi pilihan politik tentang siapa yang diprioritaskan.
- Politik anggaran menentukan arah perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan.
- Masa depan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada kualitas belanja publik dan keadilan distribusinya.



2. APBN SEBAGAI KONTRAK SOSIAL

- 1 Rakyat membayar pajak, negara wajib memberi layanan publik.
- 2 Anggaran adalah alat untuk melindungi, memberdayakan, dan membangun.
- 3 Defisit dan utang harus diarahkan untuk manfaat jangka panjang.
- 4 Transparansi dan akuntabilitas membangun kepercayaan publik.

3. 5 PILAR KESEJAHTERAAN RAKYAT



Pendidikan berkualitas



Kesehatan dan gizi



Pekerjaan dan pendapatan layak



Perlindungan sosial adaptif



Infrastruktur dan pemerataan wilayah



4. TANTANGAN POLITIK ANGGARAN

- Subsidi tidak tepat sasaran
- Kebocoran dan inefisiensi belanja
- Populisme fiskal jangka pendek
- Ketimpangan wilayah dan sosial
- Risiko utang dan ruang fiskal terbatas



5. ARAH KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN

- 1 Belanja berbasis hasil, bukan sekadar serapan
- 2 Penargetan bansos dan subsidi lebih akurat
- 3 Investasi kuat pada pendidikan, kesehatan, dan gizi
- 4 Penguatan UMKM, pangan, dan ekonomi rakyat
- 5 Reformasi pajak yang adil dan efektif
- 6 Transparansi APBN dan pengawasan publik

6. UKURAN KESEJAHTERAAN YANG PERLU DIJAGA



Kemiskinan menurun



Ketimpangan terkendali



Pengangguran rendah



Daya beli terjaga



Layanan publik membaik



Mobilitas sosial meningkat



7. PESAN PENUTUP

APBN yang baik bukan hanya besar, tetapi tepat sasaran, produktif, adil, dan akuntabel. Politik anggaran harus menjadi energi bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat kepentingan jangka pendek.



*Rudy C Tarumingkeng: Politik Anggaran dan Masa Depan
Kesejahteraan Rakyat*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

23 Juni 2026

POLITIK ANGGARAN DAN MASA DEPAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Abstrak

Politik anggaran merupakan arena paling konkret tempat negara menentukan arah kesejahteraan rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN bukan hanya dokumen fiskal, melainkan ekspresi pilihan politik: siapa yang diprioritaskan, kelompok mana yang dilindungi, wilayah mana yang dibangun, sektor mana yang diperkuat, dan generasi mana yang akan menanggung konsekuensi pembiayaan hari ini. Dalam konteks Indonesia, politik anggaran semakin penting karena APBN 2026 telah ditetapkan melalui **UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026**, dengan postur pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun, belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, dan defisit sekitar 2,68% terhadap PDB. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Artikel ini membahas politik anggaran sebagai instrumen kesejahteraan rakyat dalam tiga dimensi utama. Pertama, APBN sebagai **kontrak sosial fiskal**, yaitu hubungan antara warga yang membayar pajak dan negara yang wajib mengembalikan penerimaan tersebut dalam bentuk layanan publik, perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kedua, APBN sebagai **arena kontestasi kepentingan**, karena anggaran selalu diperebutkan oleh kementerian, lembaga, daerah, partai politik, kelompok usaha, birokrasi, dan masyarakat. Ketiga, APBN sebagai **mesin kesejahteraan masa depan**, sejauh belanja publik

diarahkan pada produktivitas, pemerataan, ketahanan sosial, dan kualitas manusia.

Data sosial-ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan sekaligus tantangan. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,25% pada September 2025, dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang; Gini ratio juga turun menjadi 0,363 pada September 2025, sedangkan tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 tercatat 4,68%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun, kesejahteraan rakyat tidak dapat diukur hanya dari penurunan kemiskinan ekstrem atau angka pengangguran. Kesejahteraan juga mencakup kualitas pekerjaan, daya beli, akses pendidikan, kesehatan, rumah layak, keamanan pangan, mobilitas sosial, perlindungan dari guncangan, dan kepercayaan terhadap negara.

Artikel ini berargumen bahwa masa depan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada kualitas politik anggaran. APBN yang besar belum tentu menyejahterakan bila belanjanya bocor, tidak tepat sasaran, tersandera patronase, atau hanya mengejar popularitas jangka pendek. Sebaliknya, APBN yang dirancang dengan disiplin fiskal, keadilan distribusi, transparansi, penganggaran berbasis hasil, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat menjadi fondasi negara kesejahteraan yang realistis bagi Indonesia. OECD memperingatkan bahwa efisiensi belanja publik Indonesia dapat ditingkatkan melalui penargetan subsidi energi yang lebih baik kepada rumah tangga rentan, sementara IMF menekankan perlunya mobilisasi pendapatan dan belanja publik berkualitas agar kebijakan fiskal lebih efektif dan ramah pertumbuhan. ([OECD](#))

Kata kunci: *politik anggaran, APBN, kesejahteraan rakyat, kebijakan fiskal, perlindungan sosial, kemiskinan, ketimpangan, subsidi, belanja publik, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Setiap negara memiliki cita-cita kesejahteraan. Dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita itu dinyatakan dalam bahasa yang sangat kuat: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun cita-cita kesejahteraan tidak cukup hanya hidup dalam konstitusi, pidato politik, atau dokumen perencanaan. Ia harus diterjemahkan ke dalam anggaran. Di situlah APBN menjadi instrumen utama negara.

APBN adalah tempat paling nyata untuk melihat apakah negara sungguh berpihak kepada rakyat. Pemerintah dapat mengatakan bahwa pendidikan adalah prioritas, tetapi APBN menunjukkan berapa yang dibelanjakan untuk pendidikan, bagaimana kualitas belanjanya, dan siapa penerima manfaatnya. Pemerintah dapat mengatakan bahwa kemiskinan harus dihapus, tetapi APBN menunjukkan apakah perlindungan sosial tepat sasaran, apakah bantuan sosial memperkuat kemandirian, dan apakah subsidi benar-benar sampai kepada kelompok rentan. Pemerintah dapat mengatakan bahwa daerah tertinggal harus dibangun, tetapi APBN menunjukkan apakah transfer daerah, infrastruktur, konektivitas, dan layanan dasar benar-benar mengurangi kesenjangan wilayah.

Dalam pengertian ini, politik anggaran bukan sekadar perebutan angka. Politik anggaran adalah perebutan masa depan. Anggaran menentukan apakah anak miskin memperoleh gizi yang cukup, apakah petani mendapat irigasi dan akses pasar, apakah nelayan mendapat perlindungan, apakah guru memperoleh dukungan, apakah rumah sakit daerah mampu melayani rakyat, apakah UMKM mendapat pembiayaan, apakah daerah terpencil memperoleh konektivitas, dan apakah generasi muda memiliki kesempatan untuk naik kelas.

Namun anggaran negara tidak pernah bebas dari kepentingan. Ia dibahas oleh pemerintah dan DPR, dipengaruhi oleh birokrasi, dikaitkan dengan janji politik, diperebutkan oleh sektor, diperjuangkan oleh daerah, dituntut oleh masyarakat, dan diawasi oleh pasar. Inilah sebabnya APBN selalu

bersifat ekonomi sekaligus politik. Ia merupakan instrumen fiskal, tetapi juga arena kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia saat ini, politik anggaran menghadapi dilema yang semakin kompleks. Di satu sisi, negara dituntut untuk memperbesar belanja publik: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pangan, energi, pertahanan, transformasi digital, transisi energi, dan program kesejahteraan. Di sisi lain, ruang fiskal tidak tak terbatas. Pemerintah harus menjaga defisit, mengelola utang, mempertahankan kepercayaan investor, menjaga rupiah, dan menghindari beban bunga yang terlalu besar.

APBN 2026 menggambarkan dilema tersebut. Secara resmi, APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, dengan berbagai belanja prioritas yang dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Kementerian Keuangan menyebut bahwa belanja prioritas perlindungan sosial dalam rancangan APBN 2026 direncanakan sebesar Rp508,2 triliun, antara lain untuk meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN, integrasi bansos dengan pemberdayaan, akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan perlindungan sosial adaptif. ([Anggaran Kemenkeu](#)) Dalam postur APBN 2026 yang telah disepakati, total belanja negara mencapai sekitar Rp3.842,7 triliun. ([Reuters](#))

Pertanyaannya adalah: apakah belanja besar otomatis menghasilkan kesejahteraan? Jawabannya tidak. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi oleh kualitas politik anggaran. Anggaran yang besar dapat menjadi berkah bila digunakan secara produktif, tepat sasaran, dan akuntabel. Namun anggaran yang besar dapat menjadi beban bila dikuasai oleh kepentingan jangka pendek, patronase, subsidi tidak tepat sasaran, proyek tidak produktif, atau kebijakan populis yang sulit dibiayai.

Artikel ini berupaya menjelaskan secara naratif dan komprehensif hubungan antara politik anggaran dan masa depan kesejahteraan rakyat. Pembahasan dimulai dari konsep APBN sebagai kontrak sosial fiskal, lalu bergerak ke politik distribusi, belanja sosial, pendidikan, kesehatan, subsidi,

pajak, utang, transfer daerah, risiko patronase, dan akhirnya rekomendasi kebijakan.

2. Politik Anggaran sebagai Inti Ekonomi Politik Negara

Politik anggaran dapat didefinisikan sebagai proses, aktor, kepentingan, dan keputusan yang menentukan bagaimana sumber daya publik dikumpulkan, dialokasikan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Karena sumber daya negara terbatas, setiap keputusan anggaran selalu mengandung pilihan. Memilih membiayai satu program berarti menunda atau mengurangi program lain. Memilih memberi subsidi pada satu barang berarti mengurangi ruang untuk belanja sektor lain. Memilih menurunkan pajak tertentu berarti mengurangi penerimaan atau memindahkan beban kepada sumber lain.

Dalam teori ekonomi publik, anggaran negara memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berarti anggaran digunakan untuk menyediakan barang publik seperti infrastruktur, keamanan, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Fungsi distribusi berarti anggaran digunakan untuk mengurangi ketimpangan dan melindungi kelompok rentan melalui pajak progresif, bantuan sosial, subsidi, dan layanan publik. Fungsi stabilisasi berarti anggaran digunakan untuk menjaga pertumbuhan, menahan guncangan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga daya beli.

Namun dalam praktik politik, ketiga fungsi itu selalu dipengaruhi oleh kepentingan. Misalnya, infrastruktur dapat dibangun bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena pertimbangan elektoral atau tekanan daerah. Bantuan sosial dapat menjadi perlindungan rakyat, tetapi juga dapat dipolitisasi. Subsidi dapat menjaga daya beli, tetapi juga dapat dinikmati kelompok mampu. Pajak dapat menjadi instrumen keadilan, tetapi juga dapat dilemahkan oleh lobi kelompok kuat.

Karena itu, politik anggaran bukan sesuatu yang harus ditolak. Dalam demokrasi, anggaran memang harus politis karena anggaran harus mencerminkan aspirasi rakyat. Masalahnya bukan bahwa APBN bersifat politis; masalahnya adalah apakah politik anggaran bekerja untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan sempit.

Politik anggaran yang sehat memiliki beberapa ciri. Pertama, prosesnya transparan. Publik mengetahui bagaimana prioritas ditentukan. Kedua, datanya terbuka dan dapat diuji. Ketiga, pembahasannya melibatkan banyak pemangku kepentingan, bukan hanya elite politik dan birokrasi. Keempat, belanjanya berbasis hasil, bukan hanya serapan. Kelima, pengawasannya kuat. Keenam, manfaatnya dapat dirasakan secara luas, terutama oleh kelompok yang membutuhkan.

Sebaliknya, politik anggaran yang tidak sehat memiliki ciri sebaliknya: tertutup, elitis, jangka pendek, bias proyek, lemah evaluasi, dan rentan patronase. Dalam kondisi seperti itu, APBN dapat terlihat besar dan ambisius, tetapi dampak kesejahteraannya terbatas.

3. APBN sebagai Kontrak Sosial Fiskal

APBN adalah kontrak sosial fiskal antara negara dan rakyat. Rakyat membayar pajak, menaati aturan, dan memberi mandat kepada pemerintah. Negara mengelola penerimaan tersebut untuk membiayai layanan publik, perlindungan sosial, pembangunan, dan stabilitas. Jika negara mengelola anggaran dengan baik, kepercayaan rakyat meningkat. Jika anggaran bocor, salah sasaran, atau dikuasai elite, kepercayaan rakyat menurun.

Kontrak sosial fiskal yang sehat memerlukan hubungan timbal balik. Warga bersedia membayar pajak bila mereka percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik. Negara memperoleh legitimasi bila layanan publik membaik. Sebaliknya, bila masyarakat melihat pajak hanya menjadi beban sementara layanan publik buruk, kepatuhan pajak melemah. Bila

rakyat melihat utang negara meningkat tetapi manfaat pembangunan tidak terasa, legitimasi fiskal terganggu.

Dalam konteks Indonesia, tantangan kontrak sosial fiskal cukup besar. Banyak warga masih bekerja di sektor informal. Basis pajak belum sekuat negara maju. Kebutuhan belanja sangat besar karena wilayah luas, jumlah penduduk besar, kesenjangan daerah, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun legitimasi fiskal dengan dua cara: memperkuat penerimaan secara adil dan memastikan belanja benar-benar menghasilkan manfaat.

Kesejahteraan rakyat tidak dapat dibangun hanya dengan bantuan sosial. Bantuan sosial penting untuk melindungi kelompok rentan, tetapi kesejahteraan jangka panjang membutuhkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan produktif, perumahan, lingkungan sehat, transportasi, keamanan pangan, dan mobilitas sosial. APBN harus bekerja di semua dimensi ini.

Kontrak sosial fiskal juga menuntut keadilan antar-generasi. Defisit APBN hari ini akan dibiayai oleh utang yang dibayar di masa depan. Jika utang digunakan untuk membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan produktivitas, generasi mendatang memperoleh manfaat. Namun jika utang digunakan untuk konsumsi politik jangka pendek, generasi mendatang menerima beban tanpa manfaat sepadan.

4. Kesejahteraan Rakyat: Lebih dari Sekadar Pendapatan

Kesejahteraan rakyat sering diukur melalui kemiskinan, pengangguran, pendapatan, dan ketimpangan. Ukuran-ukuran ini penting, tetapi belum cukup. Kesejahteraan adalah konsep multidimensi. Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kapabilitas manusia, yaitu kemampuan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, berpartisipasi, bekerja, memilih, dan menjalani hidup yang bermakna.

Dalam kerangka ini, politik anggaran harus memperluas kapabilitas rakyat. APBN harus membantu anak miskin bersekolah, keluarga rentan memperoleh gizi, pekerja informal mendapat perlindungan, petani memperoleh akses produksi, UMKM naik kelas, perempuan memperoleh kesempatan, lansia terlindungi, penyandang disabilitas dilibatkan, dan daerah tertinggal memperoleh layanan dasar.

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 turun menjadi 8,25%, dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Penurunan ini penting, tetapi 23,36 juta orang tetap merupakan jumlah yang besar. Mereka bukan angka statistik, melainkan keluarga yang menghadapi keterbatasan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan perlindungan.

Ketimpangan juga tetap menjadi isu strategis. Gini ratio Indonesia pada September 2025 tercatat 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Penurunan ini menggembirakan, tetapi ketimpangan tidak hanya tampak dalam pengeluaran. Ketimpangan juga muncul dalam kualitas sekolah, akses rumah sakit, kepemilikan aset, koneksi digital, peluang kerja, akses tanah, dan jaringan ekonomi.

Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025. Jumlah penduduk bekerja naik menjadi 147,67 juta orang, dan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai mencapai Rp3,29 juta. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya ditentukan oleh bekerja atau tidak bekerja. Kualitas pekerjaan, stabilitas pendapatan, jaminan sosial, produktivitas, upah layak, dan peluang naik kelas juga sangat menentukan.

Karena itu, politik anggaran yang berorientasi kesejahteraan harus memakai ukuran luas: kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kualitas pekerjaan, akses layanan dasar, gizi, pendidikan, kesehatan, mobilitas sosial, ketahanan terhadap krisis, dan rasa keadilan.

5. APBN 2026 dan Kesejahteraan Rakyat

APBN 2026 memberikan konteks penting bagi diskusi politik anggaran. UU Nomor 17 Tahun 2025 menjadi dasar hukum APBN Tahun Anggaran 2026. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)) Parlemen menyetujui APBN 2026 dengan total belanja sekitar Rp3.842,7 triliun, pendapatan sekitar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% terhadap PDB. ([Reuters](#))

Dari sisi kesejahteraan, APBN 2026 diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, meningkatkan layanan publik, dan mendorong pemerataan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa belanja negara, baik pusat maupun transfer ke daerah, diarahkan untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. ([Kementerian Keuangan](#))

Prioritas perlindungan sosial dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp508,2 triliun, dengan fokus pada peningkatan ketepatan sasaran melalui DTSEN, integrasi bansos dengan pemberdayaan, akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, kemitraan, serta perlindungan sosial adaptif dan inklusif. ([Anggaran Kemenkeu](#)) Sementara itu, prioritas kesehatan dalam APBN 2026 disebut sebesar Rp244,0 triliun, diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan kesehatan melalui efektivitas Jaminan Kesehatan serta peningkatan cakupan cek kesehatan gratis. ([Anggaran Kemenkeu](#))

Secara normatif, arah ini menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan. Namun secara ekonomi-politik, efektivitasnya bergantung pada implementasi. Anggaran perlindungan sosial yang besar tidak otomatis tepat sasaran. Anggaran kesehatan yang besar tidak otomatis meningkatkan kualitas layanan. Transfer daerah yang besar tidak otomatis memperbaiki sekolah dan puskesmas. Oleh karena itu, pertanyaan utama bukan hanya “berapa alokasinya?”, tetapi “apa hasilnya?”

OECD memperkirakan kebijakan fiskal Indonesia akan bersifat suportif pada 2026 karena peningkatan belanja subsidi BBM dan program makan gratis hanya sebagian diimbangi oleh kenaikan pajak dan pemotongan belanja lain. OECD juga menilai efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan dengan menargetkan subsidi energi lebih baik kepada rumah tangga rentan. ([OECD](#)) Ini merupakan peringatan penting: APBN dapat menjadi alat kesejahteraan, tetapi bila subsidi tidak tepat sasaran, ruang fiskal untuk investasi sosial jangka panjang dapat menyempit.

6. Perlindungan Sosial: Jaring Pengaman atau Tangga Mobilitas?

Perlindungan sosial memiliki dua fungsi besar. Pertama, sebagai **jaring pengaman**, yaitu melindungi rakyat dari guncangan seperti kemiskinan, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, inflasi, atau krisis ekonomi. Kedua, sebagai **tangga mobilitas**, yaitu membantu rakyat keluar dari kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan, akses modal, dan pemberdayaan.

Politik anggaran yang baik harus menyeimbangkan dua fungsi tersebut. Jika perlindungan sosial hanya menjadi jaring pengaman, rakyat mungkin terlindungi sementara tetapi tidak naik kelas. Jika perlindungan sosial hanya menjadi program pemberdayaan tanpa bantuan langsung, kelompok paling rentan bisa jatuh lebih dalam saat krisis. Karena itu, bansos, subsidi, pelatihan, akses modal, pendidikan, dan layanan dasar harus terintegrasi.

Kementerian Keuangan menyebut arah perlindungan sosial 2026 mencakup integrasi bansos dengan program pemberdayaan, akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan. ([Anggaran Kemenkeu](#)) Ini merupakan orientasi yang tepat karena kesejahteraan tidak boleh hanya bergantung pada transfer uang, tetapi harus membangun kemandirian ekonomi.

Namun integrasi semacam itu membutuhkan data yang kuat. Salah sasaran adalah masalah klasik perlindungan sosial. Ada warga miskin yang tidak

menerima bantuan, sementara warga yang lebih mampu menerima bantuan. Data yang tidak mutakhir, fragmentasi program, perbedaan basis data antar-kementerian, dan lemahnya verifikasi daerah dapat mengurangi efektivitas APBN. Oleh karena itu, reformasi perlindungan sosial harus bertumpu pada data terpadu, pembaruan dinamis, partisipasi lokal, dan mekanisme pengaduan.

Perlindungan sosial juga harus adaptif. Indonesia menghadapi risiko bencana alam, perubahan iklim, gejolak harga pangan, pandemi, dan krisis ekonomi global. Sistem perlindungan sosial adaptif berarti bantuan dapat diperluas cepat saat krisis dan dikurangi saat kondisi membaik. Ini membutuhkan data, anggaran cadangan, koordinasi pusat-daerah, dan sistem pembayaran digital yang inklusif.

7. Subsidi Energi dan Dilema Kesejahteraan

Subsidi energi adalah salah satu isu paling politis dalam anggaran Indonesia. Dari sisi kesejahteraan, subsidi energi dapat menjaga daya beli dan menahan inflasi. Harga BBM, listrik, dan energi memengaruhi transportasi, pangan, biaya produksi, dan kehidupan rumah tangga. Ketika harga energi naik, kelompok miskin dan rentan dapat terdampak cepat.

Namun subsidi energi luas sering tidak tepat sasaran. Rumah tangga yang lebih kaya biasanya mengonsumsi energi lebih banyak, sehingga menikmati subsidi lebih besar. OECD menilai efisiensi belanja publik Indonesia dapat ditingkatkan melalui penargetan subsidi energi yang lebih baik kepada rumah tangga rentan. ([OECD](#)) Reuters, mengutip penilaian World Bank, juga melaporkan bahwa subsidi BBM yang bersifat umum cenderung lebih banyak menguntungkan rumah tangga kaya daripada kelompok rentan, dan menyarankan pergeseran menuju bantuan langsung yang lebih tertarget kepada 40% rumah tangga termiskin. ([Reuters](#))

Dilema politiknya jelas. Reformasi subsidi sering tidak populer. Kenaikan harga energi dapat memicu protes dan tekanan inflasi. Pemerintah yang

menaikkan harga energi dapat dianggap tidak berpihak pada rakyat. Namun mempertahankan subsidi luas dapat membebani APBN, mempersempit ruang untuk pendidikan dan kesehatan, serta menghambat transisi energi.

Solusi kebijakan bukan mencabut subsidi secara mendadak, melainkan melakukan reformasi bertahap dan berkeadilan. Subsidi harus diarahkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Bantuan langsung dapat diperkuat. Transportasi publik harus diperbaiki. Energi terbarukan dan efisiensi energi harus dipercepat. Komunikasi publik harus jujur: subsidi luas tampak pro-rakyat, tetapi sering kali tidak paling efektif untuk rakyat miskin.

Politik anggaran yang sehat harus berani menjelaskan trade-off. Melindungi rakyat tidak selalu berarti mempertahankan harga murah untuk semua orang. Kadang melindungi rakyat berarti mengalihkan subsidi dari kelompok mampu kepada kelompok rentan dan investasi sosial jangka panjang.

8. Pendidikan sebagai Fondasi Kesejahteraan Masa Depan

Tidak ada kesejahteraan jangka panjang tanpa pendidikan. Pendidikan menentukan kemampuan warga memperoleh pekerjaan, memahami teknologi, berpartisipasi dalam demokrasi, menjaga kesehatan, dan meningkatkan pendapatan. Dalam era AI, digitalisasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan, pendidikan menjadi semakin penting.

Namun politik anggaran pendidikan tidak boleh berhenti pada besaran alokasi. Pertanyaan paling penting adalah kualitas belanja. Apakah anggaran pendidikan memperbaiki literasi, numerasi, sains, karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis? Apakah anggaran benar-benar memperbaiki mutu guru? Apakah sekolah di daerah tertinggal mendapat dukungan memadai? Apakah pendidikan vokasi terhubung dengan industri? Apakah perguruan tinggi mampu menghasilkan riset dan inovasi?

Bila belanja pendidikan hanya habis untuk rutinitas administratif, tunjangan tanpa peningkatan kinerja, gedung tanpa mutu pembelajaran, atau program yang tidak dievaluasi, maka dampaknya terhadap kesejahteraan terbatas. Sebaliknya, belanja pendidikan yang berkualitas dapat menjadi instrumen mobilitas sosial terbesar.

Politik anggaran pendidikan juga harus berpihak kepada anak dari keluarga miskin. Banyak ketimpangan dimulai sejak usia dini. Anak yang kekurangan gizi, tidak mendapat stimulasi belajar, tinggal di lingkungan miskin, dan bersekolah di sekolah bermutu rendah akan sulit bersaing. APBN harus memperkuat pendidikan anak usia dini, gizi, guru, fasilitas dasar, digital learning, dan dukungan keluarga rentan.

Kesejahteraan masa depan rakyat Indonesia akan sangat ditentukan oleh apakah APBN mampu mengubah pendidikan dari sekadar kewajiban anggaran menjadi investasi kualitas manusia.

9. Kesehatan, Gizi, dan Produktivitas Rakyat

Kesehatan bukan hanya urusan kemanusiaan, tetapi juga ekonomi. Rakyat yang sehat lebih produktif. Anak yang bergizi baik lebih mampu belajar. Ibu yang sehat melahirkan generasi yang lebih kuat. Pekerja yang memiliki akses kesehatan tidak mudah jatuh miskin karena biaya berobat.

APBN 2026 menempatkan kesehatan sebagai prioritas dengan alokasi Rp244,0 triliun, antara lain untuk meningkatkan akses, kualitas, perlindungan keuangan kesehatan, efektivitas Jaminan Kesehatan, dan cakupan cek kesehatan gratis. ([Anggaran Kemenkeu](#)) Ini menunjukkan bahwa kesehatan dipandang sebagai investasi kesejahteraan.

Namun tantangan sektor kesehatan bukan hanya anggaran. Tantangannya mencakup distribusi tenaga kesehatan, kualitas fasilitas, ketersediaan obat, pembiayaan JKN, pencegahan penyakit, integrasi data kesehatan, dan kesenjangan layanan antara kota dan desa. Jika APBN hanya membiayai

layanan kuratif tanpa memperkuat preventif, biaya kesehatan akan terus meningkat.

Gizi juga menjadi pusat politik anggaran. Program makan bergizi dapat menjadi investasi besar dalam modal manusia bila desainnya baik: tepat sasaran, kualitas pangan terjamin, rantai pasok lokal terlibat, UMKM dan petani lokal memperoleh manfaat, dan pengawasan ketat. Namun program besar juga membawa risiko: biaya fiskal tinggi, logistik kompleks, kebocoran, standar kualitas tidak merata, dan potensi politisasi.

Kesehatan dan gizi harus dilihat sebagai investasi lintas generasi. Belanja kesehatan hari ini dapat menurunkan beban penyakit masa depan. Belanja gizi anak hari ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dua puluh tahun kemudian. Oleh karena itu, politik anggaran yang berorientasi kesejahteraan harus memiliki horizon panjang.

10. Politik Anggaran Daerah dan Kesejahteraan Wilayah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan ketimpangan wilayah yang besar. Karena itu, kesejahteraan rakyat tidak cukup dibahas secara nasional. Kesejahteraan harus dibaca secara wilayah: Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, barat dan timur, pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal, kawasan pesisir, pegunungan, perbatasan, dan pulau kecil.

Transfer ke daerah adalah salah satu instrumen APBN paling penting untuk pemerataan. Melalui transfer, pemerintah pusat membantu daerah membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan dasar, desa, dan pembangunan lokal. Namun efektivitas transfer sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah.

Politik anggaran daerah sering menghadapi masalah: belanja pegawai yang besar, belanja modal terbatas, proyek kecil terfragmentasi, perencanaan lemah, pengadaan bermasalah, dan evaluasi kurang. Dana yang besar

belum tentu menghasilkan layanan publik yang baik. Oleh karena itu, transfer daerah perlu semakin berbasis kinerja.

Kesejahteraan wilayah juga membutuhkan konektivitas. Daerah terpencil sering miskin bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena terputus dari pasar, pendidikan, kesehatan, listrik, internet, dan layanan negara. APBN harus menjadi alat integrasi nasional. Infrastruktur transportasi, digital, energi, air bersih, dan logistik harus diarahkan pada pemerataan produktif.

Namun pembangunan wilayah harus menghindari pendekatan seragam. Kebutuhan Papua berbeda dari Jawa Barat. Kebutuhan Maluku berbeda dari Sumatra. Kebutuhan pesisir berbeda dari pegunungan. Politik anggaran yang baik harus sensitif terhadap konteks lokal.

11. Pajak, Keadilan Fiskal, dan Pembiayaan Kesejahteraan

Tidak ada negara kesejahteraan tanpa penerimaan negara yang memadai. Kesejahteraan membutuhkan biaya. Pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur, pertahanan pangan, dan perlindungan bencana tidak dapat dibiayai hanya dengan niat baik. Negara membutuhkan pajak.

Namun pajak adalah isu politik yang sensitif. Warga bersedia membayar pajak bila merasa sistemnya adil dan hasilnya nyata. Jika pajak dirasakan hanya membebani kelas menengah dan pelaku kecil, sementara kelompok kaya dan korporasi besar mudah menghindar, legitimasi pajak melemah. Jika pajak naik tetapi layanan publik tidak membaik, kepercayaan menurun.

IMF menekankan bahwa reformasi untuk memobilisasi pendapatan dan membiayai belanja publik berkualitas dapat membuat kebijakan fiskal Indonesia lebih efektif dan ramah pertumbuhan. ([IMF eLibrary](#)) Ini penting karena APBN kesejahteraan tidak bisa hanya bergantung pada utang. Pembiayaan kesejahteraan harus berdiri di atas basis penerimaan yang sehat.

Reformasi pajak tidak selalu berarti menaikkan tarif secara membabi buta. Reformasi pajak dapat mencakup memperluas basis pajak, memperbaiki kepatuhan, menutup celah penghindaran, memperkuat administrasi digital, mengevaluasi insentif pajak, memperkuat pajak atas aset dan konsumsi mewah secara adil, serta memastikan ekonomi digital berkontribusi.

Pajak juga harus dikaitkan dengan belanja. Warga harus melihat hubungan antara pajak yang dibayar dan manfaat yang diterima: sekolah lebih baik, rumah sakit lebih siap, jalan lebih baik, transportasi publik lebih manusiawi, keamanan lebih terjaga, dan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Tanpa hubungan itu, pajak dianggap pemaksaan, bukan partisipasi dalam pembangunan.

12. Utang, Defisit, dan Keadilan Antar-Generasi

Defisit APBN tidak selalu buruk. Dalam situasi krisis, defisit dapat menyelamatkan ekonomi. Dalam pembangunan, defisit dapat membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang manfaatnya dirasakan jangka panjang. Namun defisit menjadi berbahaya bila digunakan untuk membiayai konsumsi jangka pendek, subsidi tidak tepat sasaran, atau program politik yang tidak produktif.

APBN 2026 disetujui dengan defisit 2,68% PDB, masih di bawah batas legal 3%. ([Reuters](#)) Namun tekanan fiskal tetap perlu diperhatikan. OECD memproyeksikan defisit Indonesia dapat mendekati 3,0% PDB pada 2026 karena meningkatnya belanja subsidi BBM dan program makan gratis yang hanya sebagian diimbangi kenaikan pajak dan pemotongan belanja lain. ([OECD](#))

Utang harus dilihat dari dua sisi. Pertama, kemampuan membayar. Apakah pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan stabilitas fiskal cukup untuk membayar utang? Kedua, manfaat utang. Apakah utang menciptakan produktivitas masa depan? Jika utang digunakan untuk membangun SDM, infrastruktur produktif, dan transformasi ekonomi, maka generasi

mendatang memperoleh manfaat. Jika tidak, mereka hanya mewarisi beban.

Keadilan antar-generasi menuntut kehati-hatian. Kesejahteraan rakyat hari ini tidak boleh dibangun dengan mengorbankan generasi masa depan. Namun generasi masa depan juga dirugikan bila negara terlalu hemat sehingga gagal berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kuncinya adalah keseimbangan: defisit boleh ada, tetapi harus produktif, transparan, dan terkendali.

13. Risiko Politik Anggaran: Patronase, Populisme, dan Capture

Politik anggaran selalu rentan terhadap tiga risiko besar: patronase, populisme, dan capture.

Patronase terjadi ketika anggaran digunakan untuk mempertahankan dukungan politik melalui distribusi proyek, bantuan, jabatan, atau sumber daya kepada kelompok tertentu. Patronase sering tidak tampak sebagai pelanggaran terang-terangan, tetapi dapat terlihat dalam pola alokasi proyek yang tidak rasional, pengadaan yang menguntungkan jaringan tertentu, atau program yang diarahkan kepada basis politik.

Populisme fiskal terjadi ketika anggaran digunakan untuk program populer jangka pendek tanpa memperhitungkan keberlanjutan fiskal dan dampak produktif. Populisme fiskal dapat terasa menyenangkan pada awalnya, tetapi menjadi beban ketika defisit melebar, subsidi sulit dikurangi, dan belanja produktif terdesak.

Policy capture terjadi ketika proses anggaran dikuasai kelompok berkepentingan sehingga belanja publik lebih menguntungkan elite daripada rakyat. Ini dapat terjadi melalui lobi, pengaruh politik, akses birokrasi, atau penguasaan informasi. Dalam konteks anggaran, capture dapat muncul dalam insentif pajak yang terlalu murah hati, subsidi bagi

industri tertentu tanpa evaluasi, proyek besar dengan manfaat publik terbatas, atau pengadaan yang tidak kompetitif.

Ketiga risiko ini membuat APBN kehilangan fungsi kesejahtraannya. Anggaran tetap keluar, tetapi rakyat tidak memperoleh manfaat maksimal. Karena itu, politik anggaran harus diawasi dengan transparansi, audit, partisipasi, dan evaluasi berbasis hasil.

14. Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Belanja Publik

Kesejahteraan tidak ditentukan oleh seberapa besar belanja, tetapi oleh seberapa efektif belanja mengubah kehidupan rakyat. Inilah pentingnya kualitas belanja publik.

Belanja berkualitas memiliki beberapa ciri. Pertama, tepat sasaran. Kedua, berbasis kebutuhan nyata. Ketiga, memiliki indikator hasil. Keempat, minim kebocoran. Kelima, dievaluasi secara berkala. Keenam, memperkuat produktivitas dan kemandirian. Ketujuh, berpihak pada kelompok rentan.

Contoh belanja berkualitas adalah bantuan sosial yang benar-benar diterima keluarga miskin, disertai akses pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan modal usaha. Contoh lain adalah belanja kesehatan yang menurunkan angka penyakit, bukan hanya membayar klaim. Belanja pendidikan berkualitas meningkatkan literasi dan keterampilan, bukan hanya membangun gedung. Belanja infrastruktur berkualitas menurunkan biaya logistik dan membuka akses ekonomi, bukan hanya menjadi proyek fisik.

Belanja berkualitas membutuhkan data. Tanpa data, pemerintah tidak tahu siapa yang membutuhkan, di mana kebutuhan terbesar, dan apakah program berhasil. Namun data juga harus dipakai secara etis. Data kesejahteraan harus melindungi privasi warga dan tidak digunakan untuk diskriminasi politik.

15. Politik Anggaran dan Kelas Menengah

Kelas menengah memiliki posisi penting dalam politik kesejahteraan. Mereka membayar pajak, menopang konsumsi, membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta menjadi penopang stabilitas sosial. Namun kelas menengah Indonesia sering rentan. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan kehilangan pekerjaan.

Politik anggaran yang hanya fokus pada kelompok miskin dan proyek besar dapat mengabaikan kelas menengah rentan. Padahal, bila kelas menengah melemah, konsumsi turun, ketidakpuasan sosial meningkat, dan mobilitas sosial terhambat. APBN perlu mendukung kelas menengah melalui layanan publik berkualitas: sekolah negeri yang baik, rumah sakit terjangkau, transportasi publik, perumahan layak, perlindungan kerja, dan stabilitas harga.

Kesejahteraan rakyat tidak berarti semua orang menerima bantuan tunai. Bagi kelas menengah, kesejahteraan sering berarti layanan publik yang mengurangi beban biaya hidup. Jika pendidikan dan kesehatan publik berkualitas, kelas menengah tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk layanan privat. Jika transportasi publik baik, biaya mobilitas turun. Jika perumahan terjangkau, tekanan hidup berkurang.

16. Politik Anggaran, UMKM, dan Ekonomi Rakyat

UMKM adalah basis ekonomi rakyat. Namun UMKM sering menghadapi akses modal terbatas, produktivitas rendah, teknologi terbatas, pasar tidak stabil, dan kerentanan terhadap guncangan. APBN dapat membantu UMKM melalui pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, akses pasar, infrastruktur lokal, perlindungan sosial pekerja informal, dan pengadaan pemerintah yang inklusif.

Namun bantuan UMKM harus hati-hati. Program bantuan yang hanya bersifat seremonial atau tidak terhubung dengan pasar akan memiliki

dampak kecil. Pelatihan tanpa pendampingan tidak cukup. Kredit tanpa kapasitas usaha dapat menciptakan beban utang. Digitalisasi tanpa literasi dan akses logistik tidak efektif.

Politik anggaran untuk UMKM harus berbasis ekosistem. APBN perlu menghubungkan UMKM dengan rantai pasok, koperasi modern, pasar digital, pembiayaan mikro, standardisasi produk, pelatihan manajemen, dan perlindungan sosial. Dengan begitu, APBN tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi naik kelas.

17. Politik Anggaran dan Ketahanan Pangan

Pangan adalah isu kesejahteraan paling dasar. Harga pangan memengaruhi kemiskinan, inflasi, gizi, dan stabilitas sosial. APBN memiliki peran besar dalam irigasi, pupuk, cadangan pangan, bantuan pangan, riset pertanian, penyuluhan, logistik, dan stabilisasi harga.

Namun politik pangan sering kompleks. Subsidi pupuk dapat membantu petani, tetapi bisa bocor atau tidak tepat sasaran. Impor pangan dapat menurunkan harga konsumen, tetapi menekan petani bila tidak dikelola baik. Harga tinggi menguntungkan petani produsen, tetapi membebani konsumen miskin. Karena itu, politik anggaran pangan harus menyeimbangkan petani dan konsumen.

Ketahanan pangan masa depan membutuhkan investasi produktif: irigasi, benih, teknologi, penyimpanan, logistik dingin, pasar, data produksi, adaptasi iklim, dan regenerasi petani. Bantuan pangan penting saat krisis, tetapi ketahanan pangan jangka panjang harus dibangun melalui produktivitas.

18. Politik Anggaran dan Ketahanan Iklim

Kesejahteraan rakyat semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim. Banjir, kekeringan, gagal panen, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan kenaikan

permukaan laut dapat menghancurkan penghidupan rakyat. APBN harus mulai membaca iklim sebagai isu kesejahteraan, bukan hanya isu lingkungan.

Belanja adaptasi iklim perlu diarahkan pada infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, perlindungan pesisir, irigasi, konservasi air, asuransi pertanian, restorasi hutan, dan perlindungan kelompok rentan. Jika tidak, bencana akan terus menghapus hasil pembangunan.

Politik anggaran iklim juga harus adil. Transisi energi tidak boleh membebani kelompok miskin. Pekerja di sektor energi lama perlu dilatih untuk pekerjaan baru. Daerah penghasil komoditas perlu didampingi agar tidak kehilangan pendapatan secara mendadak. Dengan kata lain, APBN harus membangun **just transition**, yaitu transisi yang adil.

19. Reformasi Politik Anggaran untuk Masa Depan Kesejahteraan

Untuk menjadikan APBN sebagai mesin kesejahteraan, beberapa reformasi diperlukan.

Pertama, **penganggaran berbasis hasil**. Kementerian dan lembaga tidak cukup melaporkan serapan anggaran. Mereka harus melaporkan dampak: berapa anak yang membaik gizinya, berapa rumah tangga keluar dari kemiskinan, berapa sekolah meningkat mutunya, berapa biaya logistik turun, berapa UMKM naik kelas.

Kedua, **penargetan berbasis data terpadu**. Bansos, subsidi, dan program pemberdayaan harus memakai data yang mutakhir dan dapat diverifikasi. Mekanisme pengaduan masyarakat harus diperkuat.

Ketiga, **transparansi proyek dan pengadaan**. Proyek publik harus mudah diawasi. Pengadaan harus kompetitif, terbuka, dan bebas konflik kepentingan.

Keempat, **reformasi subsidi**. Subsidi luas harus bertahap diubah menjadi subsidi tepat sasaran dan dukungan langsung bagi kelompok rentan.

Kelima, **perlindungan belanja produktif**. Pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial adaptif harus dilindungi dari tekanan politik jangka pendek.

Keenam, **reformasi pajak yang adil**. Pembiayaan kesejahteraan membutuhkan penerimaan yang kuat dan adil.

Ketujuh, **pengawasan risiko fiskal**. IMF menekankan pentingnya menghindari aktivitas quasi-fiscal dan penumpukan kewajiban kontinjensi, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas Danantara agar mendukung pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi risiko. ([IMF eLibrary](#))

Kedelapan, **partisipasi publik dalam anggaran**. Warga harus dilibatkan dalam menentukan prioritas, terutama di tingkat daerah. Anggaran yang partisipatif akan lebih sesuai kebutuhan rakyat.

Kesembilan, **evaluasi independen**. Program besar harus dievaluasi oleh lembaga independen, akademisi, dan auditor publik.

Kesepuluh, **komunikasi fiskal yang jujur**. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa kesejahteraan membutuhkan pilihan sulit: pajak, subsidi, belanja, defisit, dan prioritas.

20. Tiga Skenario Masa Depan Kesejahteraan Rakyat

Skenario 1: Politik Anggaran Produktif dan Inklusif

Dalam skenario terbaik, APBN diarahkan secara disiplin pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur produktif, pangan, energi, dan UMKM. Subsidi direformasi bertahap. Pajak diperkuat secara adil. Transfer daerah berbasis kinerja. Data kesejahteraan diperbaiki. Dalam skenario ini, kemiskinan terus turun, ketimpangan terkendali, kualitas pekerjaan membaik, dan kelas menengah menguat.

Skenario 2: Politik Anggaran Stabil tetapi Terbatas

Dalam skenario moderat, APBN tetap menjaga daya beli dan pertumbuhan, tetapi reformasi berjalan lambat. Subsidi masih besar, program sosial belum sepenuhnya tepat sasaran, dan belanja produktif bersaing dengan belanja rutin. Kesejahteraan membaik perlahan, tetapi tidak terjadi lompatan besar. Indonesia stabil, tetapi rentan terhadap guncangan.

Skenario 3: Politik Anggaran Populis dan Rentan

Dalam skenario buruk, APBN terlalu banyak dipakai untuk program populer jangka pendek. Subsidi melebar, defisit mendekati batas, belanja produktif terdesak, dan risiko fiskal off-budget meningkat. Kepercayaan pasar melemah, rupiah tertekan, dan pemerintah dipaksa melakukan penyesuaian fiskal mendadak. Dalam skenario ini, rakyat rentan justru paling terdampak.

21. Kesimpulan

Politik anggaran adalah jantung masa depan kesejahteraan rakyat. APBN menentukan apakah negara hanya hadir sebagai pembagi bantuan jangka pendek atau sebagai pembangun kapabilitas manusia jangka panjang. APBN menentukan apakah rakyat hanya dilindungi dari jatuh miskin atau diberi tangga untuk naik kelas. APBN menentukan apakah pembangunan hanya berpusat pada proyek besar atau benar-benar memperbaiki kehidupan sehari-hari rakyat.

Indonesia telah mencatat kemajuan dalam penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, tetapi tantangan kesejahteraan tetap besar. BPS mencatat tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25%, Gini ratio 0,363, dan pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka-angka ini menunjukkan kemajuan, tetapi juga mengingatkan bahwa puluhan juta warga masih membutuhkan perlindungan dan kesempatan.

APBN 2026 menyediakan sumber daya besar untuk pembangunan dan kesejahteraan, tetapi besarnya anggaran harus dikawal oleh kualitas belanja. Belanja perlindungan sosial, kesehatan, subsidi, transfer daerah, dan program prioritas hanya akan menyejahterakan jika tepat sasaran, transparan, efisien, dan berbasis hasil. ([Anggaran Kemenkeu](#))

Masa depan kesejahteraan rakyat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada bagaimana hasil pertumbuhan didistribusikan dan diperkuat melalui kebijakan fiskal. Pertumbuhan tanpa perlindungan sosial akan rapuh. Perlindungan sosial tanpa produktivitas akan mahal. Subsidi tanpa reformasi akan membebani. Pajak tanpa keadilan akan ditolak. Utang tanpa manfaat produktif akan menjadi beban generasi mendatang.

Karena itu, politik anggaran Indonesia harus bergerak menuju prinsip baru: **setiap rupiah APBN harus menghasilkan nilai publik**. Nilai publik itu dapat berupa anak yang lebih sehat, siswa yang lebih cerdas, petani yang lebih produktif, pekerja yang lebih terlindungi, UMKM yang naik kelas, daerah yang lebih terhubung, lingkungan yang lebih aman, dan masyarakat yang lebih percaya kepada negara.

APBN yang baik bukan APBN yang bebas dari politik, melainkan APBN yang menjadikan politik sebagai energi untuk kesejahteraan. Politik anggaran harus mengubah aspirasi rakyat menjadi program yang produktif, inklusif, akuntabel, dan berkeadilan. Di situlah masa depan kesejahteraan rakyat Indonesia ditentukan.

Glossarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; rencana keuangan tahunan

pemerintah pusat yang memuat pendapatan, belanja, defisit atau surplus, dan pembiayaan.

Belanja Publik

Pengeluaran negara untuk membiayai layanan, program, subsidi, pembangunan, dan kewajiban pemerintah.

Belanja Produktif

Belanja yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, dan pemberdayaan ekonomi.

Bantuan Sosial

Transfer dari negara kepada individu atau rumah tangga untuk melindungi dari kemiskinan, kerentanan, atau guncangan sosial-ekonomi.

Defisit Fiskal

Keadaan ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

DTSEN

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional; basis data sosial-ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program sosial.

Gini Ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; semakin mendekati 1 berarti semakin timpang, semakin mendekati 0 berarti semakin merata.

Jaring Pengaman Sosial

Program perlindungan untuk mencegah masyarakat jatuh ke kemiskinan saat menghadapi guncangan seperti krisis, sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana.

Keadilan Fiskal

Prinsip bahwa beban pajak dan manfaat belanja negara harus dibagi secara adil sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan Rakyat

Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup, termasuk pendapatan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, keamanan, dan kesempatan.

Kontrak Sosial Fiskal

Hubungan timbal balik antara warga dan negara: warga membayar pajak dan negara wajib mengelola dana publik untuk kepentingan umum.

Patronase

Distribusi sumber daya publik untuk mempertahankan dukungan politik atau jaringan kekuasaan tertentu.

Penganggaran Berbasis Hasil

Sistem anggaran yang menilai keberhasilan program berdasarkan dampak nyata, bukan hanya jumlah uang yang dibelanjakan.

Perlindungan Sosial Adaptif

Sistem perlindungan sosial yang dapat diperluas atau disesuaikan dengan cepat saat terjadi krisis, bencana, atau guncangan ekonomi.

Politik Anggaran

Proses politik yang menentukan bagaimana pendapatan negara dikumpulkan, belanja dialokasikan, dan manfaat anggaran didistribusikan.

Populisme Fiskal

Penggunaan anggaran untuk program populer jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan fiskal atau dampak produktif.

Quasi-Fiscal Activity

Aktivitas yang berdampak seperti belanja atau subsidi negara, tetapi dilakukan di luar APBN formal, misalnya melalui BUMN atau badan investasi.

Ruang Fiskal

Kemampuan pemerintah membiayai prioritas pembangunan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

Subsidi

Dukungan pemerintah untuk menurunkan harga barang atau jasa tertentu atau membantu kelompok tertentu.

Subsidi Tepat Sasaran

Subsidi yang diberikan hanya kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada semua konsumen secara umum.

Transfer ke Daerah

Dana APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik, pembangunan, dan pemerataan.

Utang Publik

Kewajiban pemerintah yang timbul dari pembiayaan defisit, investasi, atau kebutuhan fiskal lainnya.

Daftar Pustaka

Alesina, A., & Perotti, R. (1995). Fiscal expansions and adjustments in OECD countries. *Economic Policy*, 10(21), 205–248. DOI: 10.2307/1344590

Alesina, A., & Tabellini, G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. *The Review of Economic Studies*, 57(3), 403–414. DOI: 10.2307/2298021

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Barrientos, A. (2012). Social transfers and growth: What do we know? What do we need to find out? *World Development*, 40(1), 11–20. DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.05.012

Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.

Buchanan, J. M., & Wagner, R. E. (1977). *Democracy in deficit: The political legacy of Lord Keynes*. Academic Press.

Drazen, A. (2000). *Political economy in macroeconomics*. Princeton University Press.

Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. *Journal of Development Economics*, 92(1), 39–52. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2009.01.001

Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.

Gupta, S., Clements, B., Baldacci, E., & Mulas-Granados, C. (2005). Fiscal policy, expenditure composition, and growth in low-income countries. *Journal of International Money and Finance*, 24(3), 441–463. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2005.01.004

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia*. IMF Country Report No. 2026/010. DOI: 10.5089/9798229035576.002

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. JDIH Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2026: Belanja prioritas mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi*. Direktorat Jenderal Anggaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera*. Direktorat Jenderal Anggaran.

Lindert, P. H. (2004). *Growing public: Social spending and economic growth since the eighteenth century*. Cambridge University Press.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Nordhaus, W. D. (1975). The political business cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169–190. DOI: 10.2307/2296528

OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Indonesia*. OECD Publishing.

Persson, T., & Tabellini, G. (2000). *Political economics: Explaining economic policy*. MIT Press.

Ramey, V. A. (2011). Can government purchases stimulate the economy? *Journal of Economic Literature*, 49(3), 673–685. DOI: 10.1257/jel.49.3.673

Ravallion, M. (2009). Do poorer countries have less capacity for redistribution? *Journal of Globalization and Development*, 1(2), Article 1. DOI: 10.2202/1948-1837.1105

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). *Public spending in the 20th century: A global perspective*. Cambridge University Press.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.

World Bank. (2025). *Poverty and shared prosperity indicators for Indonesia*. World Bank.

Wildavsky, A. (1964). *The politics of the budgetary process*. Little, Brown.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 23 June 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>